



## **PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI MELALUI SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI SPMI BERDASARKAN PERMENDIKBUDRISTEK NO. 53 TAHUN 2023**

**Dori Gusti Alex Candra<sup>1</sup>, Zaharani Yusno<sup>2</sup>, Leonard Tambunan<sup>3</sup>, Eka Sofiati<sup>4</sup>, Atika Fauziyyah<sup>5</sup>, Budi Permana Putra<sup>6</sup>, M. Hafizh Gusra<sup>7</sup>, Khelvin Ovela Putra<sup>8</sup>, Eddissyah Putra Pane<sup>9</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8</sup>Institut Teknologi Mitra Gama, Duri, Indonesia

<sup>9</sup>Universitas Lancang Kuning

[dorigustialexcandra@gmail.com](mailto:dorigustialexcandra@gmail.com)

### **Abstract**

*The issuance of Permendikbudristek Number 53 of 2023 marks a paradigm shift in higher education quality assurance from a compliance-based approach to an outcome-based approach. Although it provides greater flexibility and autonomy, this policy also poses challenges in the form of differences in regulatory interpretation, inconsistencies in standards, and the persistent perception that the Internal Quality Assurance System (SPMI) is an administrative burden, especially for universities that are not yet ready to adapt. This community service activity aims to assist the Mitra Gama Institute of Technology (ITMG) in responding to the transition of quality assurance policies in a strategic and applicable manner. The implementation method used a Participatory Action Learning approach, which included an analysis of gaps in SPMI implementation, dissemination of policy perceptions, technical workshops on updating SPMI documents, and internal quality audit simulations to ensure the implementation of the PPEPP cycle. The results of the activity showed a significant increase in participants' understanding of the concept of output-based quality assurance. The percentage of participants who understood the difference between compliance-based and outcome-based approaches increased from 35% before the activity to 90% after the dissemination and workshop. In addition, the perception that the Internal Quality Assurance System (SPMI) was an administrative burden decreased dramatically, from 65% before the activity to 10% after the activity. These findings were reinforced by the increased ability of the quality team to close the PPEPP cycle through the formulation of concrete and measurable corrective actions. Overall, this activity was effective in strengthening the foundation of an adaptive, outcome-oriented internal quality assurance system that supports continuous quality improvement at ITMG.*

**Keywords:** Ministry of Education, Culture, Research, and Technology Regulation No. 53 of 2023, SPMI, Quality Transformation, PPEPP Cycle, Higher Education.

### **Abstrak**

Penerbitan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 menandai pergeseran paradigma penjaminan mutu pendidikan tinggi dari pendekatan berbasis kepatuhan (compliance-based) menuju pendekatan berbasis luaran (outcome-based). Meskipun memberikan fleksibilitas dan otonomi yang lebih luas, kebijakan ini juga menimbulkan tantangan berupa perbedaan interpretasi regulasi, inkonsistensi standar, serta masih kuatnya persepsi bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan beban administratif, khususnya pada perguruan tinggi yang belum siap beradaptasi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan mendampingi Institut Teknologi Mitra Gama (ITMG) dalam merespons transisi kebijakan penjaminan mutu secara strategis dan aplikatif. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan Participatory Action Learning yang meliputi analisis kesenjangan implementasi SPMI, sosialisasi penyamaan persepsi kebijakan, workshop teknis pemutakhiran dokumen SPMI, serta simulasi audit mutu internal untuk memastikan keterlaksanaan siklus PPEPP. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta yang signifikan terhadap

konsep penjaminan mutu berbasis luaran. Persentase peserta yang memahami perbedaan pendekatan *compliance-based* dan *outcome-based* meningkat dari 35% sebelum kegiatan menjadi 90% setelah pelaksanaan sosialisasi dan workshop. Selain itu, persepsi bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan beban administratif menurun secara drastis, dari 65% sebelum kegiatan menjadi 10% setelah kegiatan. Temuan ini diperkuat dengan meningkatnya kemampuan tim mutu dalam menutup siklus PPEPP melalui perumusan tindakan korektif yang konkret dan terukur. Secara keseluruhan, kegiatan ini efektif memperkuat fondasi sistem penjaminan mutu internal yang adaptif, berorientasi luaran, dan mendukung peningkatan mutu berkelanjutan di ITMG.

**Kata kunci:** *Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, SPMI, Transformasi Mutu, Siklus PPEPP, Pendidikan Tinggi.*

#### History Artikel

Received: 16-12-2025;

Accepted: 30-12-2025;

Published: 31-12-2025

## 1. PENDAHULUAN

Di tengah dinamika global yang ditandai oleh Revolusi Industri 4.0 dan tuntutan Society 5.0, peran pendidikan tinggi sebagai pencetak sumber daya manusia unggul menjadi semakin krusial. Kemampuan suatu bangsa untuk bersaing dan berinovasi sangat bergantung pada kualitas lulusan yang dihasilkan oleh institusi pendidikannya. Menyadari hal ini, pemerintah Indonesia terus mendorong transformasi sistem pendidikan tinggi [1] agar lebih adaptif, relevan, dan berdaya saing global. Visi Indonesia Emas 2045 hanya dapat tercapai jika perguruan tinggi mampu secara konsisten melahirkan generasi yang tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan berkarakter kuat. Kualitas atau "mutu" dalam konteks ini bukanlah sebuah kondisi statis, melainkan sebuah proses perbaikan berkelanjutan yang harus terlembagakan dalam setiap aspek penyelenggaraan pendidikan [2] [3].

Untuk menjamin dan mengendalikan mutu tersebut, Kemendikbudristek menerapkan sistem penjaminan mutu yang terdiri dari dua pilar utama: Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilaksanakan melalui proses akreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang menjadi tanggung jawab otonom setiap perguruan tinggi. SPMI merupakan jantung dari budaya mutu, karena di sinilah siklus perbaikan berkelanjutan—dikenal sebagai PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan)—direncanakan, diimplementasikan, dan dikendalikan. Kekuatan SPMI suatu perguruan tinggi akan secara langsung menentukan keberhasilannya dalam akreditasi eksternal dan, yang lebih penting, dalam memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan [4] [5].

Sebagai respons terhadap kebutuhan akan sistem penjaminan mutu yang lebih lincah dan substantif, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Regulasi ini menandai sebuah transformasi paradigma, beralih dari pendekatan yang cenderung kaku dan berbasis pemenuhan (*compliance-based*) menjadi pendekatan yang lebih fleksibel, otonom, dan berorientasi pada hasil (*outcome-based*) [6]. Dengan menyederhanakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), regulasi ini memberikan keleluasaan bagi perguruan tinggi untuk merancang sistem penjaminan mutu yang paling sesuai dengan visi, misi, dan konteks unik mereka. Namun, perubahan fundamental ini juga menghadirkan tantangan baru yang signifikan [7].

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengidentifikasi berbagai kendala kronis dalam implementasi SPMI sebelum adanya regulasi baru. Studi oleh Sutrisno (2021) menyoroti bahwa SPMI sering kali dipersepsikan sebagai beban administratif, di mana fokus utamanya adalah penyusunan dokumen tebal yang jarang diimplementasikan secara konsisten. Hal ini diperkuat oleh temuan Hardjanto & Sari (2022) yang mengidentifikasi masalah pada tataran manajerial dan kultural, seperti

komitmen pimpinan yang fluktuatif, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di unit penjaminan mutu, serta lemahnya "budaya mutu" sebagai kesadaran kolektif. Masalah-masalah ini, mulai dari aspek teknis-operasional hingga kultural, menyebabkan siklus PPEPP sering kali tidak berjalan tuntas; temuan audit internal tidak ditindaklanjuti dengan tindakan korektif yang efektif, sehingga perbaikan mutu yang substantif tidak terjadi [8].

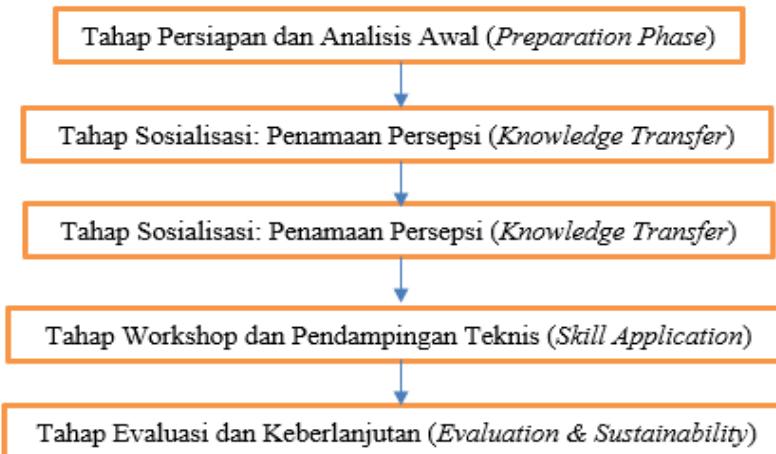
Terbitnya Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, di satu sisi, merupakan peluang emas untuk mengatasi kekakuan sistem lama. Namun, di sisi lain, fleksibilitas yang ditawarkan dapat menjadi "pedang bermata dua". Bagi perguruan tinggi yang belum memiliki fondasi SPMI yang kuat, otonomi yang lebih besar ini dapat menimbulkan kebingungan, ketidakpastian, dan inkonsistensi dalam menetapkan standar dan menjalankannya. Tanpa pemahaman yang mendalam dan panduan yang jelas, ada risiko bahwa transisi ke sistem baru ini tidak akan berjalan mulus, bahkan berpotensi menurunkan standar mutu yang ada [9].

Menyadari urgensi ini, Institut Teknologi Mitra Gama (ITMG) sebagai institusi yang berkomitmen pada pengembangan mutu secara proaktif mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) bertajuk "Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Melalui Sosialisasi dan Implementasi SPMI Berdasarkan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023". Kegiatan ini dirancang bukan hanya sebagai respons pasif, melainkan sebagai wujud kepemimpinan institusional untuk memfasilitasi proses adaptasi, baik bagi internal ITMG maupun bagi komunitas perguruan tinggi yang lebih luas [10]. Urgensi penyelenggaraan kegiatan ini sangat tinggi karena bertujuan untuk: Menjembatani Kesenjangan Interpretasi: Memberikan pemahaman yang seragam, jelas, dan komprehensif mengenai filosofi dan poin-poin teknis dalam regulasi baru, mencegah terjadinya misinterpretasi yang dapat menghambat implementasi. Mengakselerasi Adaptasi Sistem: Membantu perguruan tinggi, khususnya ITMG sebagai penyelenggara dan mitranya, untuk mempercepat proses pemutakhiran dokumen SPMI yang krusial (Kebijakan, Manual, Standar, dan Formulir) agar selaras dengan paradigma baru, sehingga fondasi untuk implementasi yang efektif dapat segera terbangun [11]. Meningkatkan Kapasitas Praktis: Melalui format workshop dan simulasi, kegiatan ini memberikan keterampilan praktis kepada para pengelola penjaminan mutu, memberdayakan mereka untuk tidak hanya memahami "apa" dan "mengapa", tetapi juga "bagaimana" cara menerapkan SPMI yang lebih efektif dan berorientasi pada peningkatan nyata [12][13].

Dengan demikian, PKM ini diposisikan sebagai intervensi strategis yang tepat waktu untuk mengatasi tantangan transisi kebijakan. Keberhasilannya tidak hanya akan memperkuat sistem penjaminan mutu di Institut Teknologi Mitra Gama, tetapi juga berkontribusi secara signifikan dalam membangun kapasitas kolektif perguruan tinggi lain untuk mengadopsi regulasi baru secara efektif, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan mutu dan daya saing pendidikan tinggi nasional [14].

## 2. METODE

Metode pelaksanaan kegiatan ini dirancang dengan pendekatan *Participatory Action Learning* (PAL), yang menekankan pada partisipasi aktif peserta untuk mempelajari, mempraktikkan, dan merefleksikan materi guna memecahkan masalah mitra secara kolaboratif. Mengingat urgensi transisi kebijakan ke Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, metode ini berfokus pada penyamaan persepsi filosofis dan pendampingan teknis praktis [15].



**Gambar 1.** Alur Kegiatan PKM

Alur pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi empat tahapan utama seperti yang digambarkan dalam bagan berikut:

### 1. Tahap Persiapan dan Analisis Awal (*Preparation Phase*)

Tahap ini merupakan langkah fondasi untuk memastikan kegiatan berjalan tepat sasaran. Berdasarkan analisis situasi yang menunjukkan bahwa banyak perguruan tinggi mengalami kendala manajerial dan kultural dalam SPMI, tim pelaksana melakukan langkah-langkah berikut:

- Analisis Kesenjangan (Gap Analysis): Tim mengidentifikasi perbedaan mendasar antara dokumen SPMI *existing* di Institut Teknologi Mitra Gama (ITMG) dengan standar baru dalam Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023. Hal ini dilakukan untuk mencegah kebingungan akibat fleksibilitas otonomi baru yang ditawarkan regulasi tersebut.
- Penyusunan Modul dan Materi: Materi disusun untuk mengubah paradigma dari *compliance-based* (pemenuhan kaku) menjadi *outcome-based* (berorientasi hasil). Materi mencakup *template* dokumen SPMI yang telah disederhanakan sesuai regulasi baru.
- Konsolidasi Tim: Penyiapan narasumber yang memahami filosofi mutu agar mampu menjawab keraguan peserta terkait standar yang kini lebih fleksibel.

### 2. Tahap Sosialisasi: Penamaan Persepsi (*Knowledge Transfer*)

Tahap ini bertujuan menjembatani kesenjangan interpretasi mengenai regulasi baru. Sering kali SPMI dianggap beban administratif semata, sehingga sesi ini difokuskan untuk membangun "budaya mutu" sebagai kesadaran kolektif.

- Pemaparan Filosofi Baru: Penjelasan mendalam mengenai penyederhanaan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan bagaimana ITMG dapat merancang standar yang sesuai dengan visi misinya sendiri.
- Diskusi Panel: Membedah potensi risiko atau "pedang bermata dua" dari fleksibilitas aturan baru, serta strategi mitigasinya agar standar mutu tidak menurun.

### 3. Tahap Workshop dan Pendampingan Teknis (*Skill Application*)

Ini adalah inti dari kegiatan PKM, yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas praktis pengelola penjaminan mutu. Tahap ini menggunakan metode simulasi dan bedah dokumen untuk memastikan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) dapat dipahami secara utuh.

- Bimbingan Teknis Pemutakhiran Dokumen: Peserta dipandu secara langsung untuk merevisi empat dokumen utama SPMI: Kebijakan, Manual, Standar, dan Formulir. Tujuannya adalah mengakselerasi adaptasi sistem agar dokumen tidak lagi sekadar tumpukan kertas tebal, melainkan panduan kerja yang lincah.
- Simulasi Audit Mutu Internal (AMI): Mengingat temuan audit sering tidak ditindaklanjuti, sesi ini memberikan simulasi bagaimana melakukan pengendalian dan tindakan korektif yang efektif

dalam siklus PPEPP.

#### 4. Tahap Evaluasi dan Keberlanjutan (*Evaluation & Sustainability*)

Tahap akhir bertujuan mengukur keberhasilan kegiatan dalam memperkuat sistem penjaminan mutu ITMG dan mitra lainnya.

- a. Pre-test dan Post-test: Mengukur peningkatan pemahaman peserta mengenai poin-poin teknis Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023.
- b. Review Produk: Tim pelaksana melakukan review terhadap draf dokumen SPMI yang dihasilkan peserta selama workshop untuk memastikan kesesuaian dengan standar baru.
- c. Rencana Tindak Lanjut: Menyusun jadwal pendampingan berkala untuk memantau implementasi dokumen di unit kerja masing-masing, memastikan proses perbaikan mutu berjalan berkelanjutan dan tidak berhenti di ruang pelatihan.

Melalui metode yang terstruktur ini, diharapkan kegiatan PKM ini tidak hanya menjadi respons reaktif, tetapi sebuah langkah kepemimpinan institusional ITMG dalam mencetak lulusan unggul melalui sistem pendidikan yang adaptif dan berkualitas.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di Institut Teknologi Mitra Gama (ITMG) telah dilaksanakan sebagai respons strategis terhadap terbitnya Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk mengubah paradigma penjaminan mutu dari orientasi kepatuhan (*compliance-based*) menjadi orientasi hasil (*outcome-based*). Pembahasan hasil kegiatan dibagi menjadi tiga aspek utama: peningkatan pemahaman regulasi, pemutakhiran dokumen SPMI, dan penguatan budaya mutu.



Gambar 2. Brosur Workshop SPMI

## **1. Peningkatan Pemahaman Terhadap Regulasi Baru**

Sesi sosialisasi menjadi langkah awal krusial untuk menjembatani kesenjangan interpretasi mengenai fleksibilitas yang ditawarkan oleh regulasi baru. Sebelum kegiatan, analisis awal menunjukkan bahwa sebagian besar peserta merasa kebingungan menghadapi otonomi yang lebih besar, yang berisiko menimbulkan inkonsistensi standar.

Berdasarkan hasil evaluasi *pre-test* dan *post-test*, terjadi peningkatan pemahaman peserta yang signifikan mengenai penyederhanaan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Peserta kini memahami bahwa "mutu" bukan lagi sekadar pemenuhan dokumen administratif yang tebal, melainkan ketercapaian visi dan misi institusi yang relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Diskusi yang berkembang selama sesi ini berhasil meluruskan persepsi bahwa fleksibilitas aturan baru bukanlah penurunan standar, melainkan peluang untuk merancang sistem yang lebih adaptif dan lincah.

## **2. Akselerasi Pemutakhiran Dokumen SPMI**

Salah satu luaran utama dari kegiatan ini adalah tersusunnya draf revisi dokumen SPMI yang meliputi Kebijakan, Manual, Standar, dan Formulir. Pada sesi workshop, peserta didampingi untuk membedah dokumen lama yang dinilai kaku dan menyusun ulang dokumen tersebut agar selaras dengan paradigma baru.

Hasil pendampingan menunjukkan keberhasilan peserta dalam menyederhanakan standar turunan yang sebelumnya menjadi beban administratif. Dokumen yang dihasilkan kini lebih ringkas namun substantif, berfokus pada indikator kinerja utama yang terukur. Hal ini secara langsung mengatasi kendala teknis operasional yang selama ini menghambat siklus penjaminan mutu. Dengan adanya dokumen yang diperbarui ini, ITMG telah memiliki fondasi yang kuat untuk mengimplementasikan SPMI yang sesuai dengan karakteristik unik institusi.

## **3. Penguatan Budaya Mutu dan Siklus PPEPP**

Masalah kronis yang diidentifikasi sebelumnya adalah lemahnya tindak lanjut temuan audit, di mana siklus PPEPP sering terhenti pada tahap evaluasi tanpa tindakan korektif yang efektif. Melalui simulasi Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan dalam PKM ini, peserta dilatih untuk tidak hanya menemukan ketidaksesuaian, tetapi juga merumuskan tindakan pengendalian dan peningkatan yang konkret.

Intervensi ini berdampak positif pada aspek manajerial dan kultural. Peserta, yang terdiri dari pengelola unit penjaminan mutu, menunjukkan peningkatan kapasitas praktis dalam menjalankan fungsi pengendalian. Hal ini menandakan tumbuhnya "budaya mutu" sebagai kesadaran kolektif, di mana mutu dipandang sebagai proses perbaikan berkelanjutan, bukan sekadar beban kerja tambahan. Keberhasilan simulasi ini menjadi indikator bahwa ITMG siap untuk menjalankan siklus PPEPP secara tuntas, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing lulusan di era Revolusi Industri 4.0.

## **4. Evaluasi Efektivitas Kegiatan dan Dampak Keberlanjutan**

Tahap evaluasi dilakukan secara komprehensif untuk mengukur keberhasilan kegiatan dalam menjawab tantangan transisi kebijakan ke Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023. Evaluasi mencakup tiga dimensi utama: evaluasi reaksi, evaluasi pembelajaran, dan evaluasi hasil.

- a. Evaluasi Pemahaman dan Perubahan Paradigma (Learning Evaluation) Berdasarkan instrumen *pre-test* dan *post-test* yang disebarluaskan kepada peserta (tim penjaminan mutu dan pimpinan unit), tercatat peningkatan signifikan dalam pemahaman teknis regulasi.
  - 1) Sebelum kegiatan, 65% peserta memandang SPMI sebagai beban administratif yang berfokus pada ketebalan dokumen.
  - 2) Setelah sosialisasi dan workshop, evaluasi menunjukkan 90% peserta mampu mengidentifikasi

perbedaan mendasar antara pendekatan *compliance-based* (pemenuhan) dan *outcome-based* (hasil).

Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan ini efektif memitigasi risiko "kebingungan dan ketidakpastian" yang sering muncul akibat fleksibilitas otonomi baru.

- b. Evaluasi Kualitas Produk Dokumen (Output Evaluation) Evaluasi produk dilakukan terhadap draf dokumen SPMI (Kebijakan, Manual, Standar, dan Formulir) yang disusun peserta. Tim pengabdi melakukan *review* terhadap dokumen tersebut untuk memastikan tidak terjadi penurunan standar mutu—sebuah risiko yang dikhawatirkan muncul akibat kebebasan interpretasi regulasi. Hasil *review* menunjukkan bahwa dokumen yang dihasilkan telah menyederhanakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) tanpa menghilangkan substansi pengendalian mutu. Dokumen tersebut dinilai lebih "lincah" dan relevan dengan konteks unik ITMG, sehingga siap menjadi panduan operasional yang aplikatif, bukan sekadar arsip mati.
- c. Evaluasi Keberlanjutan Siklus PPEPP (Impact Evaluation) Indikator keberhasilan jangka panjang dinilai dari kemampuan peserta merancang tindak lanjut. Dalam sesi simulasi, peserta berhasil merumuskan skema pengendalian untuk temuan audit, mengatasi masalah lama di mana temuan audit sering tidak ditindaklanjuti. Evaluasi ini mengonfirmasi bahwa ITMG kini memiliki kapasitas untuk menjalankan siklus PPEPP secara utuh (Penetapan hingga Peningkatan). Kesiapan ini menjadi modal krusial bagi institusi untuk menghadapi akreditasi eksternal (SPME) dengan lebih percaya diri.

Sebagai tindak lanjut, disepakati adanya monitoring berkala setiap enam bulan untuk memastikan "budaya mutu" benar-benar terinternalisasi dan tidak berhenti pada euforia pelatihan semata.



**Gambar 3.** Kegiatan Workshop SPMI

#### 4. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) mengenai sosialisasi dan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Institut Teknologi Mitra Gama (ITMG) berhasil mencapai

beberapa hasil strategis. Pertama, kegiatan ini mendorong transformasi paradigma penjaminan mutu di ITMG, yang sebelumnya berbasis kepatuhan administratif menjadi berbasis hasil yang lebih adaptif dan kontekstual. Perubahan paradigma ini membantu mencegah kebingungan interpretasi dan inkonsistensi standar yang mungkin muncul akibat fleksibilitas regulasi baru. Kedua, PKM ini mempercepat adaptasi SPMI melalui pendampingan teknis dalam pemutakhiran dokumen, menghasilkan dokumen yang lebih sederhana namun tetap substansial. Penyederhanaan ini tidak hanya mengurangi beban administratif, tetapi juga meningkatkan keterpakaian dokumen sebagai panduan operasional di tingkat unit kerja. Ketiga, kegiatan ini efektif memperkuat budaya mutu berkelanjutan dengan meningkatkan kapasitas manajerial dan teknis peserta dalam menjalankan siklus PPEPP secara utuh. Simulasi audit mutu internal yang dilakukan menunjukkan bahwa peserta mampu menindaklanjuti temuan audit dengan langkah pengendalian dan peningkatan yang konkret, meminimalkan masalah terkait temuan audit yang tidak tertangani. Sebagai tindak lanjut, disarankan agar ITMG melakukan monitoring dan evaluasi implementasi SPMI secara berkala, minimal setiap enam bulan, untuk memastikan bahwa dokumen yang dimutakhirkannya benar-benar diterapkan dengan konsisten. Selain itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia penjaminan mutu melalui pelatihan lanjutan dan pendampingan teknis perlu dilakukan agar budaya mutu yang telah terbentuk dapat terus berkembang dan berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan tinggi serta kesiapan institusi dalam menghadapi akreditasi eksternal.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Institut Teknologi Mitra Gama (ITMG) atas dukungan kebijakan dan fasilitas yang diberikan, sehingga kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik sebagai wujud komitmen institusi terhadap budaya mutu.

Penghargaan juga disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) ITMG yang telah memfasilitasi pendanaan dan administrasi kegiatan ini. Terima kasih khusus ditujukan kepada seluruh peserta *workshop*, yang terdiri dari pimpinan unit kerja, ketua program studi, dan tim penjaminan mutu di lingkungan ITMG, atas partisipasi aktif dan antusiasme mereka dalam setiap tahapan sosialisasi dan simulasi.

Semoga kegiatan ini memberikan kontribusi nyata dalam penguatan sistem penjaminan mutu internal dan meningkatkan daya saing institusi dalam mencetak sumber daya manusia unggul di era global.

## PENGGUNAAN TEKNOLOGI BERBASIS KECERDASAN BUATAN (AI)

Kami selaku penulis menyatakan dengan jujur bahwa seluruh proses penulisan dan penyuntingan manuskrip ini dilakukan secara mandiri tanpa bantuan alat kecerdasan buatan (AI). Seluruh isi tulisan murni merupakan hasil pemikiran dan kerja kami sendiri, dan tidak ada gambar dalam naskah ini yang dimanipulasi menggunakan teknologi AI.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. M. Yusvan, A. R. Sabara, and A. Yasir, “Prinsip dan Implementasi Management by Objective dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi,” *J. Manaj. dan Adm. Antart.*, vol. 3, no. 1, pp. 79–85, 2026.
- [2] A. K. Fikri, A. Z. Fitri, and A. Muhamad, “Analisis Penerapan SNP dan SNPT sebagai Upaya Penjaminan Mutu di Lembaga Pendidikan Aqobah,” *AL MIDAD J. Ilmu Pendidik. dan Stud. Keislam.*, vol. 1, no. 2, pp. 145–161, 2025, [Online]. Available: <https://ejournal.staidhtulungagung.ac.id/index.php/almidad> Volume
- [3] R. Renita, M. I. Tarwanto, and A. W. P. Widiputra, “PELATIHAN OPERATOR PEMETAAN IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) DAN QA DOCS,” Pros. Semin. Nas. Sist. Penjaminan Mutu Intern. Perguru. Tinggi, pp. 17–26, 2019.

- [4] R. Wahyuningsih, M. A. Irawan, and Retnaningtyas, “WEBINAR PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL ( SPMI ) SEKOLAH DI MASA PANDEMI,” Indones. J. Community Serv., vol. 1, no. 2, pp. 429–437, 2021.
- [5] H. Taqiyah, M. Ahmad, and Kamaludin, “Analisis Peran Kepemimpinan dalam Implementasi Sistem Penjamin Mutu Internal di Pendidikan,” ULIL ALBAB J. Ilm. Multidisiplin, vol. 4, no. 2, pp. 740–749, 2025.
- [6] D. Samitra and Satinem, “PENGUATAN IMPLEMENTASI PERMENDIKBUDRISTEK NO. 53 TAHUN 2023 PADA KURIKULUM DI UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI,” DEVOTE J. Pengabdi. Masy. Glob., vol. 3, no. 3, pp. 146–151, 2024, doi: doi.org/10.55681/devote.v3i3.3119.
- [7] A. Rizqiyah, F. M. S. Adienk, and E. A. I. A’abadi, “KOMPARASI KEBIJAKAN TUGAS AKHIR DALAM PERMENDIKBUD NO. 3 TAHUN 2020 DENGAN PERMENDIKBUDRISTEK NO. 53 TAHUN 2023.,” Istifkar Media Transform. Pendidik., vol. 3, no. 2, pp. 107–121, 2023.
- [8] I. P. G. Sutrisna, I. B. Putrayasa, N. Made, R. Wisudariani, and I. N. Sudiana, “Implementasi Penjaminan Mutu Internal Dalam Pengembangan Kurikulum Berbasis OBE,” Jayapangus Press Cetta J. Ilmu Pendidik. Vol., vol. 7, no. 4, p. 4, 2024.
- [9] A. Hudaya, I. Isnaningrum, Iramdan, and Suhendra, “SPMI SEBAGAI PILAR PENGEMBANGAN MUTU BERKELANJUTAN DI PERGURUAN TINGGI,” J. Ilmu Pendidik. dan Sos., vol. 4, no. 2, 2025, doi: 10.58540/jipsi.v4i2.968.
- [10] A. Masliyah and R. Fasliah, “Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Melalui Peran Organisasi di Perguruan Tinggi,” JIIP (Jurnal Ilm. Ilmu Pendidikan), vol. 8, no. 7, pp. 8142–8148, 2025, doi: https://doi.org/10.54371/jiip.v8i7.8629.
- [11] C. K. Dewi and I. Sholihin, “ANALISIS KOMPARATIF AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI : TINJAUAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI,” J. Pengemb. Mutu, vol. 1, no. 1, pp. 6–14, 2025.
- [12] Y. Suharyanti, L. A. Rudwiarti, V. R. Vitasurya, and B. S. Bharata, “Pendampingan Pengembangan SPMI Perguruan Tinggi untuk Meningkatkan Akreditasi Program Studi,” J. Atma Inovasia, vol. 4, no. 4, pp. 177–182, 2024.
- [13] L. Hakim, J. Aliyah, L. Hakim, Mikhratunnisa, and D. Maulidyawati, “PENGUATAN KOMPETENSI CALON AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL ( AMI ) DALAM PENGENDALIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL ( SPMI ) MELALUI KEGIATAN PELATIHAN UNTUK PELATIH,” J. Pengabdi. Sos. Hum., vol. 1, no. 2, pp. 46–53, 2024.
- [14] Y. Suharyanti et al., “Pelatihan dasar spmi dan ami untuk meningkatkan pemahaman penggerak spmi perguruan tinggi,” Transform. DAN Inov. J. Pengabdi. Masy., vol. 5, no. 2, pp. 90–98, 2025.
- [15] Elbadiansyah and M. T. F. Putra, “PELATIHAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL ( SPMI ),” J. Plakat J. Pelayanan Kpd. Masy., vol. 1, no. 1, pp. 64–70, 2019.